

**PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN MENGOPTIMALISASIKAN
PEMAHAMAN PERBEDAAN BUDAYA WARGA MASYARAKAT INDONESIA
DALAM KAJIAN MANIFESTASI PLURALISME
DI ERA GLOBALISASI**

Oleh: Muhammad Mona Adha*

ABSTRACT

Pluralism in Indonesia is a wealth of experience to the citizens to be able to coexist in harmony. The main value of mutual respect and love between people is an important concern in Indonesia in the future to build a more cultured. Discourse of "global village" is a part of life's internalization structure that should be able to be adapted as a process of modern life in the era of globalization. Values corresponding to the ideal conception of Indonesian culture can be developed that do not fade due process undertaken transnational citizens in generating diversity. Education, understanding, pluralistic, and democratic become an absolute key to contribute in teaching the people to live in harmony in unity and unity.

Key Words: Civic education, pluralism, globalization.

PENDAHULUAN

Apabila membahas mengenai konsep perbedaan/keanekaragaman yang ada di sebuah wilayah negara, akan berbeda konsepnya negara yang satu dengan negara yang lain. Katakanlah budaya Amerika, maka budaya yang masuk ke negara ini dibawa oleh para imigran seperti Eropa, Inggris, Amerika Latin, dan negara-negara di sekitar Amerika. Akan berbeda dengan konsep keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia. Di Indonesia, perbedaan budaya atau keanekaragaman yang terjadi dikarenakan dibawa oleh warga masyarakat Indonesia itu sendiri dari berbagai wilayah. Bahkan banyak warga masyarakat yang melakukan

pergerakan atau perpindahan dari wilayah Barat Indonesia ke wilayah Timur Indonesia, kemudian dari wilayah Timur Indonesia ke wilayah Tengah Indonesia. Pergerakan tersebut memberikan dampak perubahan yang cukup berpengaruh terhadap kebudayaan dan keberagaman.

Warga masyarakat yang bergerak secara dinamis dan kompleks dalam sebuah negara, hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh James A. Banks (2004: 1) bahwa, "*Citizenship is a fluid, complex, dynamic, and contested concept in the nation-states discussed.*" Cairnya interaksi antara warga masyarakat secara signifikan memberikan kontribusi terhadap asimilasi

* Dosen Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung

dan enkulturasi dalam kehidupan sosial masyarakat. Sejalan dengan yang dikemukakan oleh James A. Banks (2004: 20) bahwa, "*Citizenship depended on membership of the nation, seen as a cultural community, whose members were held together by bonds of solidarity, based on shared history, values, and traditions.*" Sejauh ini, sikap saling hormat-menghormati dan menghargai satu dengan yang lain selalu dipegang teguh oleh warga masyarakat dalam menciptakan lingkungan sosial yang lebih tertib, aman, nyaman, dan bertanggung jawab.

Keanekaragaman yang ada di Amerika tentu berbeda dengan keanekaragaman di Indonesia. Di Indonesia perbedaan yang ada bermula dari titik interaksi di antara sesama warga masyarakat Indonesia dalam sistem kehidupan sosial kemasyarakatan yang heterogen. Seperti contoh, orang Lampung mempunyai konsep *Fiil Pesenggiri* dengan kendali utama adalah sebagai integritas diri, keberanian, dan kepercayaan diri yang melekat kuat dalam kehidupan anggota masyarakat Lampung.

Kebutuhan akan identitas diri atau jati diri bagi sebuah bangsa di tengah maraknya globalisasi menggugah bangsa ini untuk memberdayakan nilai-nilai budaya yang dibutuhkan dalam menghadapi tantangan masa depan. Senada dengan yang dikemukakan oleh David S.

Meyer (2005: 5) bahwa, "*social practices into "identities" is forged from the interaction between people and that state.*" Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa identitas akan didapat dari hasil interaksi antar individu itu sendiri dan individu dengan negara. Melalui upaya pembangunan jati diri bangsa pada setiap warga negara Indonesia dengan memiliki jatidiri bangsa berlandaskan Pancasila. Melalui pembudayaan dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila yang berjalan secara efektif dan mendasar, maka Pancasila dapat muncul keberadaannya dalam ruang dan perilaku yang nyata dari setiap warga negara Indonesia.

Identitas nasional harus memiliki pondasi yang kuat agar tidak terpengaruh oleh cepatnya penyerapan budaya global yang negatif, kemudian bangsa Indonesia harus memiliki kemampuan dalam mengadopsi budaya global yang relevan dalam upaya pembangunan bangsa dan karakter bangsa (*nation and character building*).

Nilai-nilai budaya asing mulai deras masuk dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia di era globalisasi seperti sekarang ini. Kehidupan perekonomian masyarakat berangsur-angsur berubah dari agraris ke industri, industri berkembang maju dan pada zaman sekarang tatanan kehidupan lebih banyak didasarkan pada pertimbangan ekonomi,

sehingga bersifat materialistik. Senada dengan yang dikemukakan oleh Jan Nederveen Pieterse (2009: 7) bahwa

Globalization is like a prism in which major disputes over the collective human condition are now refracted: questions of capitalism, inequality, power, development, ecology, culture, gender, identity, population, all come back in a landscape where "globalization did it." Like a flag word globalization sparks conflict. Globalization crosses boundaries of government and business, media and social movements, general and academic interest. As a political challenge, it crosses the ideological spectrum and engages social movements and politics at all levels. It involves a paradigm shift from the era of the nation state and international politics to politics of planetary scope.

Berdasarkan pendapat di atas dapat dijelaskan bahwa globalisasi juga turut mempengaruhi perubahan secara signifikan dalam kehidupan masyarakat saat ini. Perubahan yang sangat cepat dalam suatu ruang lingkup sehingga berpengaruh terhadap aspek-aspek lainnya baik itu dalam ruang lingkup akademik, politik dan lain sebagainya.

Budaya yang dibawa oleh masing-masing orang dan bertemunya antara dua buah kebudayaan atau budaya dalam satu lingkungan tentunya akan menimbulkan perbedaan-perbedaan pemahaman atau cara pandang, dimana sekaligus ini menjadi tantangan dalam kebudayaan itu sendiri

agar lebih kaya dengan unsur-unsur yang terdapat di dalamnya. Terlebih dengan era globalisasi seperti sekarang ini memungkinkan *cultural clashes* itu terjadi, dikarenakan pergerakan manusia dari satu tempat ke tempat yang lainnya yang tidak dapat ditahan karena zaman saat ini adalah era komunikasi dan telekomunikasi sehingga pergerakan manusia itu terjadi dengan lebih cepat (transnasional). Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Stephan Fuchs (2001: 139):

But culture is not in the mind. Minds may contribute something to culture, but only after a culture has trained and prepared them. That which a mind can "know" is limited. A mind can do very little; networks a lot. The mind can focus on something, such as writing or reading this text here and now, but there are also all the other minds, belonging to different persons, who focus on something different. The mind's focus is also quickly changed or lost—for example, by a loud noise, a different focus, getting tired, and so on. In the meantime, the network continues its work.

Berdasarkan pendapat Stephan Fuchs tadi dapat dijelaskan bahwa budaya atau kebudayaan itu tidak dapat hanya disimpan atau dihafal saja dalam pikiran individu. Melainkan budaya dapat diperoleh melalui hasil komunikasi dan interaksi antar individu yang berlainan latar belakang budayanya. Karena apabila budaya hanya ada dalam alam pikiran saja,

maka kebudayaan dapat dengan begitu saja hilang dan tidak dapat dikembangkan.

Pluralisme di Indonesia mutlak adanya yang harus diterima secara sadar oleh warga masyarakat Indonesia dikarenakan pluralisme akan berlangsung secara terus-menerus melalui kegiatan interaksi warga masyarakat. Pluralisme tidak bisa dihindari dan dibiarkan begitu saja. Melainkan perbedaan yang ada menjadi kajian yang cukup baik bagi Indonesia untuk menciptakan rasa kebersamaan dan hidup harmonis dalam satu kesatuan Indonesia (*Unity and Diversity*). Senada dengan yang dikemukakan oleh James A. Banks (2004: 3) bahwa, *“However, every pluralistic nation-state must also be concerned about unity and a set of shared values.”* Keanekaragaman budaya mulai mendapat perhatian serius pada pergantian abad ini. Namun makna sesungguhnya dari terminologi yang luas ini sering diartikan bermacam-macam dan juga berubah-ubah. Sebagian memandang keanekaragaman budaya sebagai sesuatu hal yang positif karena bertujuan untuk berbagi kekayaan yang dikandung dalam tiap budaya di dunia dan, oleh karenanya, menyatukan kita semua melalui berbagai proses pertukaran dan dialog (www.unesco.org, 2014).

Pluralisme dalam Konteks Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dan Globalisasi.

Sesuai dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 3 yang menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Seperti yang dikemukakan oleh Adnan dalam Rohmadi (2010: 4) bahwa pendidikan adalah proses internalisasi budaya ke dalam diri seseorang dan masyarakat sehingga membuat orang dan masyarakat menjadi beradab. Pendidikan bukan merupakan sarana transfer ilmu pengetahuan saja, tetapi lebih luas lagi yakni sebagai sarana pembudayaan dan penyaluran nilai (enkulturasi dan sosialisasi). Lebih lanjut dijelaskan bahwa seorang anak harus mendapatkan pendidikan yang menyentuh 3 dimensi dasar kemanusiaan: (1) *afektif* yang tercermin pada kualitas keimanan, ketaqwaan, akhlak mulia, (2) *kognitif* yang

tercermin pada kapasitas piker dan daya intelektualitas untuk menggali dan mengembangkan, dan (3) *psikomotorik* yang tercermin pada kemampuan mengembangkan keterampilan teknis, kecakapan praktis, dan kompetensi *kinestetis*.

Budimansyah (2007: 34) menjelaskan bahwa *Civic Education* dikembangkan sebagai *central goal* dari sistem pendidikan, dipersyaratkan untuk seluruh tingkatan sekolah yang menerapkan pembelajaran yang “*of high quality and sufficient quantity*,” menggunakan pendekatan yang bersifat “*interdisciplinary*” dan metode pembelajaran yang bersifat “*interactive*”.

Desain kurikulum yang menitikberatkan pada “*how to think rather than what to think*” merefleksikan “*community realities*” yang mencakup materi “*historical*” dan *contemporary*, memperlakukan kelas sebagai “*democratic laboratory*. “*Students must attain democratic values in school if we ever hope to change the political, social, and economic structures of stratified societies and nations states because they are the future citizens and leaders of societies and nation states*,” (Parker dalam James A. Banks, 2004: 10). Kontribusi masyarakat dalam “*civic education*” dan melibatkan siswa dalam masyarakat untuk mendapatkan “*civic experiences in the*

community.” Paradigma ini tampaknya merupakan pengembangan secara sinergistik dari tradisi “*citizenship transmission, social science dan reflective inquiry*.” Sejalan dengan yang disampaikan oleh James A. Banks (2004: 9) bahwa, “*Citizenship education programs and curricula are trying to teach students democratic ideals and values within social, economic, political, and educational contexts*.” Melalui pendidikan kewarganegaraan dapat memberikan kemampuan dalam berdemokrasi sekaligus memiliki nilai-nilai yang baik bagi kehidupan sosial warga masyarakat, siswa pada khususnya.

Suryadi (1999: 31) mengemukakan bahwa *Civic Education* menekankan pada empat hal: *pertama*, *Civic Education* bukan sebagai indoktrinasi politik, *Civic Education* sebaiknya tidak menjadi alat indoktrinasi politik dari pemerintahan yang berkuasa. *Civic Education* seharusnya menjadi bidang kajian kewarganegaraan serta disiplin lainnya yang berkaitan secara langsung dengan proses pengembangan warga negara yang demokratis sebagai pelaku-pelaku pembangunan bangsa yang bertanggung jawab.

Kedua, *Civic Education* mengembangkan *state of mind*, pembangunan karakter bangsa merupakan proses pembentukan warga negara yang cerdas serta berdaya nalar tinggi. *Civic*

education memusatkan perhatian pada pembentukan kecerdasan (*civic intelligence*), tanggung jawab (*civic responsibility*), dan partisipasi (*civic participation*) warga negara sebagai landasan untuk mengembangkan nilai dan perilaku demokrasi. Demokrasi dikembangkan melalui perluasan wawasan, pengembangan kemampuan analisis serta kepekaan sosial bagi warga negara agar mereka ikut memecahkan permasalahan lingkungan. Kecakapan analitis itu juga diperlukan dalam kaitan dengan sistem politik, kenegaraan, dan peraturan perundang-undangan agar pemecahan masalah yang mereka lakukan adalah realistis.

Ketiga, Civic Education adalah suatu proses pencerdasan, pendekatan mengajar yang selama ini seperti menuangkan air ke dalam gelas (*watering down*) seharusnya diubah menjadi pendekatan yang lebih partisipatif dengan menekankan pada latihan penggunaan nalar dan logika. *Civic education* membelajarkan siswa memiliki kepekaan sosial dan memahami permasalahan yang terjadi di lingkungan secara cerdas. Dari proses itu siswa dapat juga diharapkan memiliki kecakapan atau kecerdasan rasional, emosional, sosial dan spiritual yang tinggi dalam pemecahan permasalahan sosial dalam masyarakat.

Keempat, Civic Education sebagai laboratorium demokrasi, sikap dan perilaku demokratis perlu berkembang bukan melalui mengajar demokrasi (*teaching democracy*), akan tetapi melalui penerapan cara hidup berdemokrasi (*doing democracy*) sebagai modus pembelajaran. Melalui penerapan demokrasi, siswa diharapkan akan secepatnya memahami bahwa demokrasi itu penting bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Proses pendidikan dan pembelajaran di dalam kelas saat ini tidak terlepas dari perkembangan informasi dan teknologi. Setiap pengajar dan pembelajar dituntut untuk mengikuti kemajuan zaman tersebut. Herschock (2007) mengatakan bahwa, “*A second characteristics of contemporary globalization processes that has profound effects on education policies and practices in the manner in which these processes accelerate the pace of technological, scientific, social, economic, political, and cultural change.*”

Dengan demikian, berdasarkan pendapat Herschock di atas bahwa perkembangan informasi, teknologi secara global harus bisa diikuti dan mampu dalam operasinya guna membawa perubahan secara dinamis diberbagai bidang terutama dibidang pendidikan. Karena dengan pendidikan akan lebih mengarahkan sikap dan perilaku warga masyarakat.

Pendidikan Kewarganegaraan, Daya Saing, dan Globalisasi

Era globalisasi menuntut setiap orang untuk dapat melakukan dengan apa yang dinamakan “daya saing.” Ini penting, dengan semakin derasnya informasi dan teknologi dalam kehidupan globalisasi seperti sekarang ini, individu harus dapat mengembangkan diri sendiri, komunitas, dan masyarakat luas, hingga ada dampak positif serta memajukan bangsa dan negara. Hal ini senada dengan apa yang dikemukakan di bawah ini:

Globalization has wrought transformation of similar scale: in how people live, work, identify and aggregate, communicate and engage locally, nationally, internationally, globally, and how they are educated. Changes are taking place in the nature of the state itself, in how states interact, and in the roles of supra and non state actors in organizing and affecting human behavior. At the core of contemporary globalization are transformations in how capital flows throughout the globe and is linked to production and consumption, in how energy is harnessed and consumed, in how information and knowledge are created, transmitted and conserved, how labor is employed and deployed, and how value is created, distributed, conserved and destroyed. (Hershock et al, 2007: 29)

Kemudian untuk membangun daya saing bangsa dan kemandirian sains dan teknologi memerlukan peran aktif semua pihak, baik pemerintah, dunia usaha,

akademisi, maupun masyarakat secara umum. Oleh karena itu disinilah pentingnya letak pembentukan karakter bagi peserta didik walaupun memiliki kemampuan bersaing, agar tiap individu khususnya peserta didik untuk tetap beretika, bermoral, sopan santun dan dapat berinteraksi dan membangun masyarakat agar kedepan lebih baik.

Sudah saatnya bagi Indonesia, melalui pendidikan kewarganegaraan bagi siswa untuk dapat mengedepankan bahwa konsep lokal mampu berkompetisi dan meningkat kepada sistem global/internasional, “*Citizenship education should also help students acquire the attitudes, knowledge, and skills needed to function in cultural communities other than their own, within the national culture and community, as well as within the global community*” (James A. Banks: 2004: 7). Warga masyarakat harus sadar bahwa pluralisme bukan mempersempit pola kehidupan masyarakat, tetapi memberikan rangkaian pemahaman suatu proses nilai secara utuh dari keseluruhan yang ada di Indonesia. Oleh karena itulah untuk memiliki mentalitas yang tanggap terhadap kemajuan Iptek dan ekonomi global, maka diperlukan mentalitas pembangunan, dan proses pengembangan mental yang dikenal dengan modernisasi. Hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh Saskia Sassin (2007: 6) dalam

bukunya *A Sociology of Globalization*.

Although localized in national, indeed, in subnational settings, these processes are part of globalization in that they involve transboundary networks entities connecting multiple local or national processes and actors, or the recurrence of particular issues or dynamic in a growing number of countries or localities.

Dengan demikian maka pentingnya sikap tenggang rasa, kepekaan untuk tidak berbuat semena-mena yang merugikan pihak lain, dan selalu siap untuk bekerjasama dengan bangsa lain sepanjang tidak merugikan kepentingan bangsa sendiri. Mentalitas kegotongroyongan efektif untuk menetralisasi tekanan-tekanan dari perkembangan masa kini yang tidak jarang mengarah pada asal untung sendiri, yang menipiskan kepedulian terhadap sesama manusia.

Pluralisme menjadi nilai utama untuk memberikan pemahaman dan pengertian kepada masyarakat global bahwa Indonesia mampu menjawab kebutuhan dasar warga negara dalam sudut pandang nilai-nilai individual menuju kepada nilai kebersamaan komunitas. Konsep pemahaman aktualisasi nilai-nilai kemasyarakatan yang dibentuk akan mendukung proses penyatuan Indonesia secara utuh.

Islam menyambut dengan baik konsep perbedaan antar satu dengan yang

lainnya. Dalam Al-Quran jelas diungkapkan bahwa manusia itu diciptakan bersuku-suku, bermacam ragam kebudayaan, memiliki kebiasaan yang menjadi pola kehidupan masing-masing. Kemudian, dengan kehidupan yang berbeda-beda tersebut, umat manusia harus menjadi satu, karena multikultur dan kehidupan plural adalah suatu kenyataan yang harus diakui oleh umat manusia. Saling melengkapi, menghargai, menghormati, dan menyayangi adalah yang utama dan pertama yang menjadikan keharmonisan kehidupan dalam memperkuat rangkaian tatanan kehidupan yang dapat diaktualisasikan dengan baik.

Tidak ada yang salah dalam keberanekaragaman. Yang salah adalah banyak pelaku interaksi sosial yang tidak mau membuka diri terhadap perubahan nyata yang terjadi dalam warga masyarakat. Bagaimana tatanan sosial yang sudah disepakati bersama baik secara tertulis maupun tidak tertulis dapat dipahami jika pelaku interaksi sosial masyarakat masih memiliki konsep pemahaman yang sempit dalam masa sekarang (globalisasi) yang berkembang dengan cepat.

Oleh karena itulah Pendidikan kewarganegaraan di Indonesia harus mampu melihat konsep bahwa Indonesia sebagai negara yang memiliki keanekaragaman yang sangat banyak,

diharapkan dapat memberikan pengertian atau pemahaman kepada warga masyarakat agar dapat memahami perbedaan tersebut terhadap satu dengan yang lainnya. Dengan saling memahami, menghargai, dan menghormati, warga masyarakat Indonesia akan memberikan kontribusi yang baik bagi “*global village*” sehingga kemudian akan memberikan proses belajar yang lebih luas lagi dalam situasi kehidupan transnasional global saat ini.

KESIMPULAN

Manusia sebagai makhluk berbudaya adalah manusia yang diciptakan untuk menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai makhluk Tuhan. Manusia harus menguasai segala sesuatu yang berhubungan dengan kepemimpinannya di muka bumi di samping tanggung jawab dan etika moral harus dimiliki, menciptakan nilai kebaikan, kebenaran, keadilan dan tanggung jawab agar bermakna bagi kemanusiaan dan lingkungan sekitarnya. Pendidikan sebagai hasil kebudayaan haruslah dipandang sebagai motivator terwujudnya kebudayaan yang tinggi. Selain itu pendidikan haruslah memberikan kontribusi terhadap kebudayaan yang beretika, agar kebudayaan yang dihasilkan memberi nilai manfaat bagi manusia itu sendiri khususnya maupun bagi bangsa pada umumnya. Kemajuan teknologi adalah

sesuatu yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan ini, karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan.

DAFTAR RUJUKAN

- Banks, J.A. (2004). *Diversity and Citizenship Education: Global Perspective*. San Fransisco: Jossey-Bass.
- Budimansyah, D. (2008). *PKN dan Masyarakat Multikultural*. Bandung: Program Studi PKn SPs UPI.
- Fuchs, S. (2001). *Against Essentialism (A Theory of Culture and Society)*. London: Harvard University Press.
- Hershock, D. Peter et al. (2007). *Changing Education: Leadership, Innovation and Development in a Globalizing Asia Pacific*. China: Springer- Comparative Education Research Centre The University of Hong Kong.
- Meyer, David. S (2002). *Social Movement (Identity, Culture, dan the State)*. New York: Oxford University Press.
- Pieterse, Jan Nederveen (2009). *Globalization and Culture*. London: Rowman & Littlefield Publishers, Inc.
- Rohmadi, M. (2010). *Pembentukan Karakter Guru dan Dosen sebagai Upaya Mewujudkan Pendidikan Karakter di Indonesia*. (Makalah di presentasikan dalam Seminar Nasional dengan tema “Aktualisasi Pendidikan Karakter Bangsa dalam

Rangka Memperingati Dies natalis Universitas Pendidikan Indonesia ke-56 tanggal 15 November 2010 di Auditorium Sekolah Pascasarjana UPI bandung).

Sassen, Saskia (2007). *A Sociology of Globalization*. New York: W.W. Norton & Company, Inc.

Suryadi, A. (2009). *Mewujudkan Masyarakat Pembelajar: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Bandung: Widya Aksara Press.

UNESCO. (2014). *Berinvestasi dalam Keanekaragaman Budaya dan Dialog Antar budaya*. Diakses tanggal 11 November 2014 dari: www.unesco.org.